



KEMENTERIAN
HAJI DAN UMRAH RI

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur ke

hadirat Allah SWT, penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Haji dan Umrah Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik sebagai tindak lanjut atas implementasi Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah. Dokumen ini disusun sebagai panduan strategis dalam menjalankan tugas kementerian untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji

dan umrah yang lebih transformatif, efektif, aman, dan nyaman, sebagai perwujudan *Tri Sukses Haji*, yaitu sukses ritual, sukses ekonomi, dan sukses peradaban dan keadaban.

Kementerian Haji dan Umrah mengemban peran penting dalam mendukung visi besar Pemerintah “*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*” dan misi *Asta Cita*. Dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, peran tersebut diwujudkan melalui penguatan layanan yang berbasis pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kebermanfaatan, agar jemaah tidak hanya mampu menunaikan ibadah secara sah dan sempurna, tetapi juga memiliki dampak sosial yang positif serta memperoleh manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Dalam proses penyusunannya, Laporan Kinerja Kementerian Haji dan Umrah Tahun 2025 dirumuskan dengan mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan nasional, termasuk RPJMN, hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah pada tahun-tahun sebelumnya, serta hasil survei dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan di bidang perhajian. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan strategi yang mencerminkan komitmen kami untuk menghadirkan layanan yang profesional, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Laporan Kinerja ini menekankan pentingnya transformasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara menyeluruh, mulai dari tahap pra-operasional, operasional, hingga pasca-operasional, dengan penguatan tata kelola, inovasi layanan, serta kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Pendekatan ini diharapkan mampu mewujudkan pengalaman ibadah yang lebih berkualitas bagi jemaah, sekaligus memperkuat upaya mewujudkan *Tri Sukses Haji*

secara nyata dan berkelanjutan. Perhatian khusus juga diberikan kepada pemenuhan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas, serta penguatan ekosistem yang memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional.

Kami menyadari bahwa keberhasilan implementasi Laporan Kinerja ini hanya dapat dicapai melalui sinergi dan kerja sama yang kuat antara Kementerian Haji dan Umrah dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, termasuk kementerian/lembaga terkait dan Tim Perumus Laporan Kinerja.

Akhir kata, kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang semakin berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta menghadirkan manfaat yang luas bagi umat Islam dan bangsa Indonesia. Semoga Allah

tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, termasuk kementerian/lembaga terkait dan Tim Perumus Laporan Kinerja.

Akhir kata, kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang semakin berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta menghadirkan manfaat yang luas bagi umat Islam dan bangsa Indonesia. Semoga AllahSWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Desember 2025

Menteri Haji dan Umrah

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Hajj and Umrah, Republic of Indonesia. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name 'Mochammad Irfan Yusuf Hasyim' is printed, preceded by a blue arrow icon.

➡ Mochammad Irfan Yusuf Hasyim

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
TABEL GAMBAR	20
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Kedudukan, tugas dan fungsi	3
1.3. Struktur Organisasi	4
II. PERENCANAAN KINERJA	6
2.1. Tujuan Kementerian Haji dan Umrah	7
2.2. Skala Pengukuran	9
2.3. Sasaran Strategis	8
2.4. Indikator Kinerja Utama	9
III. Akuntabilitas Kinerja	10
3.1. Analisis Capaian Kinerja	15
3.2. Realisasi Anggaran	19
3.3. Analisis Efisiensi Anggaran	20
IV. Penutup	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan salah satu bentuk pelayanan publik strategis yang menjadi tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional umat Islam untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia yang mencapai lebih dari dua ratus ribu orang setiap tahun, Indonesia menghadapi kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji yang semakin meningkat, baik dari sisi manajemen pelayanan, pengelolaan logistik, pengawasan penyelenggaraan, maupun koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dalam konteks tersebut, pemerintah terus melakukan reformasi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji agar mampu memberikan pelayanan yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Secara historis, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia sebelumnya dilaksanakan oleh **Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kementerian Agama**. Namun, seiring dengan meningkatnya dinamika penyelenggaraan haji dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kepada jemaah, pemerintah melakukan transformasi kelembagaan guna memperkuat fokus, efektivitas, serta akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji.

Transformasi kelembagaan tersebut diawali dengan pembentukan **Badan Penyelenggara Haji (BPH)** melalui kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji secara lebih profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan jemaah. Pembentukan Badan Penyelenggara Haji menjadi tonggak penting dalam upaya modernisasi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat mandat kelembagaan serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara nasional, pemerintah menetapkan pembentukan **Kementerian Haji dan Umrah** sebagai kementerian teknis yang secara khusus bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Pembentukan kementerian ini menandai transformasi strategis dalam tata kelola pelayanan keagamaan di Indonesia, di mana fungsi perumusan

kebijakan, pelayanan, pembinaan, pengawasan, serta pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah dilaksanakan secara lebih terintegrasi dalam satu kelembagaan.

Kementerian Haji dan Umrah memiliki peran strategis tidak hanya dalam memastikan terselenggaranya ibadah haji yang aman, nyaman, dan sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi juga dalam memperkuat diplomasi penyelenggaraan haji dengan pemerintah Arab Saudi, meningkatkan kualitas pelayanan publik keagamaan, serta mengembangkan ekosistem ekonomi haji yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

Sejalan dengan mandat tersebut, Kementerian Haji dan Umrah menetapkan kerangka transformasi penyelenggaraan ibadah haji yang berlandaskan pada **Tri Sukses Haji**, yaitu sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi haji, serta sukses keadaban dan peradaban. Kerangka ini menjadi landasan strategis dalam membangun sistem penyelenggaraan ibadah haji yang tidak hanya berorientasi pada kualitas pelaksanaan ibadah, tetapi juga memberikan dampak sosial, ekonomi, dan peradaban yang lebih luas bagi umat dan bangsa.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, Kementerian Haji dan Umrah menyusun **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja Kementerian Haji dan Umrah) Tahun 2025** sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Penyusunan laporan ini merupakan implementasi dari **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. Laporan Kinerja Kementerian Haji dan Umrah juga menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi kinerja organisasi, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta memperkuat budaya akuntabilitas di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah.

Dengan demikian, Laporan Kinerja Kementerian Haji dan Umrah Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja kementerian dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, sekaligus menjadi dasar dalam melakukan perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang semakin berkualitas, profesional, dan

memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan umat dan pembangunan nasional.

1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kementerian Haji dan Umrah merupakan kementerian yang dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Kementerian Haji dan Umrah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi:

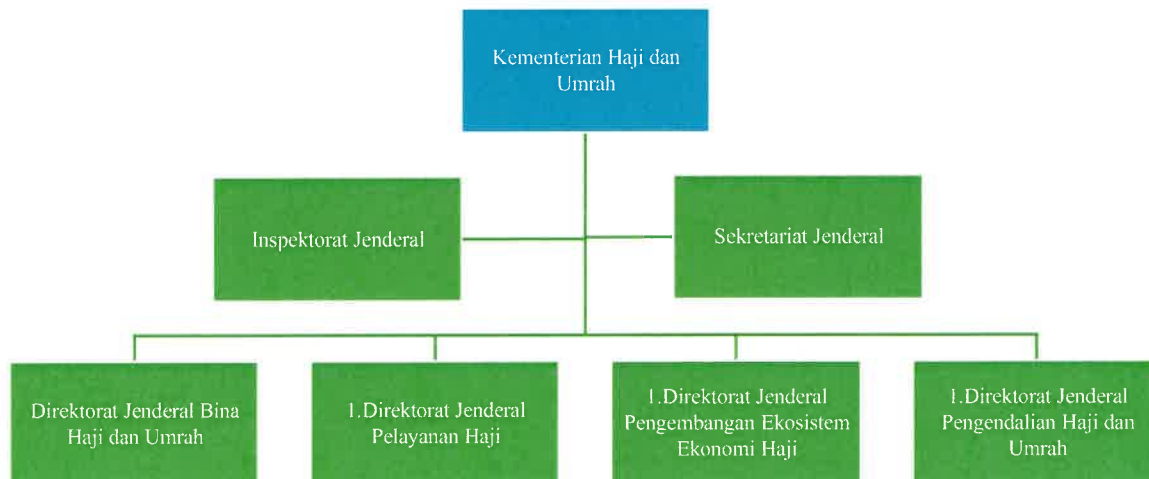
1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
2. Pelaksanaan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan jemaah haji dan umrah.
3. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
4. Pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah.
5. Pelaksanaan diplomasi penyelenggaraan ibadah haji dengan pemerintah Arab Saudi.
6. Pelaksanaan dukungan manajemen dan administrasi kementerian.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kementerian Haji dan Umrah disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara efektif dan terintegrasi.

Struktur organisasi Kementerian Haji dan Umrah terdiri dari:

1. Menteri Haji dan Umrah
2. Sekretariat Jenderal
3. Inspektorat Jenderal
4. Direktorat Jenderal Bina Haji dan Umrah
5. Direktorat Jenderal Pelayanan Haji
6. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji
7. Direktorat Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah



Struktur organisasi tersebut dirancang untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berjalan secara profesional, efektif, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada jemaah.

1.4 Isu Strategis Penyelenggaraan Haji

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Haji dan Umrah menghadapi sejumlah isu strategis yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji, antara lain:

1. **Peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji** pada seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari pendaftaran, bimbingan manasik, pemberangkatan, hingga pelayanan selama di Arab Saudi.
2. **Penguatan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji** yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.
3. **Transformasi digital layanan haji dan umrah** untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan bagi jemaah.
4. **Penguatan diplomasi haji dengan pemerintah Arab Saudi** guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia.
5. **Pengembangan ekosistem ekonomi haji** agar penyelenggaraan ibadah haji dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Isu strategis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian Haji dan Umrah guna mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang semakin berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kepuasan jemaah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan kinerja Kementerian Haji dan Umrah disusun sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menekankan keterkaitan yang kuat antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta pelaporan kinerja. Perencanaan kinerja tersebut berpedoman pada dokumen **Rencana Strategis Kementerian Haji dan Umrah Tahun 2025–2029** yang disusun sebagai arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dalam jangka menengah.

Sebagai kementerian yang memiliki mandat strategis dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan ibadah haji yang berkualitas, profesional, transparan, serta berorientasi pada kepuasan jemaah. Selain itu, kementerian juga berupaya mengoptimalkan potensi ekonomi yang timbul dari penyelenggaraan ibadah haji sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan umat dan perekonomian nasional.

Perencanaan strategis Kementerian Haji dan Umrah juga berlandaskan pada kerangka transformasi penyelenggaraan ibadah haji yang dikenal dengan **Tri Sukses Haji**, yaitu:

1. **Sukses Ritual**, yaitu terselenggaranya ibadah haji yang sah, tertib, aman, dan sesuai dengan tuntunan syariat.
2. **Sukses Ekosistem Ekonomi Haji**, yaitu optimalisasi potensi ekonomi dari penyelenggaraan ibadah haji yang memberikan nilai tambah bagi umat dan perekonomian nasional.
3. **Sukses Keadaban dan Peradaban**, yaitu penguatan nilai-nilai etika, kedisiplinan, serta citra jemaah haji Indonesia sebagai teladan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Kerangka tersebut menjadi landasan dalam merumuskan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja Kementerian Haji dan Umrah.

2.2 Tujuan Kementerian Haji dan Umrah

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, Kementerian Haji dan Umrah menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang aman, nyaman, dan berorientasi pada mutu layanan serta peningkatan kualitas ibadah.
2. Mengembangkan ekosistem ekonomi haji yang berkelanjutan dan memberikan dampak bagi kesejahteraan umat.
3. Mewujudkan tata kelola kelembagaan penyelenggaraan ibadah haji yang profesional, transparan, adaptif, dan berintegritas.

Tujuan tersebut menjadi arah utama dalam penyusunan kebijakan, program, serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah.

2.3 Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Haji dan Umrah menetapkan **tiga sasaran strategis** yang menjadi fokus kinerja organisasi.

Sasaran Strategis 1

Terselenggaranya ibadah haji yang berkualitas, aman, nyaman, dan berorientasi pada mutu layanan serta peningkatan kualitas ibadah.

Sasaran strategis ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan secara profesional dan berorientasi pada kepuasan jemaah.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ini adalah:

- Indeks Kepuasan Jemaah Haji Dalam Negeri
- Indeks Kepuasan Jemaah Haji Luar Negeri

Sasaran Strategis 2

Terbangunnya ekosistem ekonomi haji yang berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan umat.

Sasaran strategis ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang timbul dari penyelenggaraan ibadah haji melalui penguatan rantai nilai ekonomi haji yang melibatkan berbagai sektor usaha dan masyarakat.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah:

- Indeks Pemberdayaan Ekonomi Haji Berkelanjutan dan Berdampak

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya tata kelola Badan Penyelenggara Haji yang profesional, transparan, adaptif, dan berintegritas dalam mendukung peningkatan kesejahteraan umat.

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan melalui implementasi reformasi birokrasi dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah:

- Nilai Reformasi Birokrasi

2.4 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis, Kementerian Haji dan Umrah menetapkan indikator kinerja utama sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
1	Terselenggaranya ibadah haji yang berkualitas, aman, nyaman, dan berorientasi pada mutu layanan serta peningkatan kualitas ibadah	Indeks Kepuasan Jemaah Haji Dalam Negeri	91,58
		Indeks Kepuasan Jemaah Haji Luar Negeri	87,50
2	Terbangunnya ekosistem ekonomi haji yang berkelanjutan dan berdampak	Indeks Pemberdayaan Ekonomi Haji Berkelanjutan dan Berdampak	10
3	Terwujudnya tata kelola Badan Penyelenggara Haji yang profesional, transparan, adaptif, dan berintegritas	Nilai Reformasi Birokrasi	58

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai komitmen pelaksanaan kinerja organisasi, Menteri Haji dan Umrah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang memuat target kinerja yang harus dicapai oleh kementerian selama tahun berjalan.

Perjanjian kinerja tersebut menjadi dasar bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Perjanjian kinerja juga menjadi instrumen penting dalam memastikan adanya keselarasan antara perencanaan strategis, pelaksanaan program, serta pengukuran kinerja organisasi.

2.6 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis, Kementerian Haji dan Umrah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang meliputi:

1. Program penyelenggaraan pelayanan haji dan umrah.
2. Program pembinaan jemaah haji dan umrah.
3. Program pengembangan ekosistem ekonomi haji.
4. Program pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan haji dan umrah.
5. Program dukungan manajemen dan tata kelola organisasi.

Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah guna memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Kementerian Haji dan Umrah merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dalam menyelenggarakan pelayanan ibadah haji dan umrah serta pengembangan ekosistem ekonomi haji. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja yang diperoleh pada tahun pelaporan.

Pada tahun 2025, Kementerian Haji dan Umrah menetapkan tiga sasaran strategis yang diukur melalui empat indikator kinerja utama. Capaian kinerja terhadap sasaran strategis tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya ibadah haji yang berkualitas, aman, nyaman, dan berorientasi pada mutu layanan serta peningkatan kualitas ibadah	Indeks Kepuasan Jemaah Haji Dalam Negeri	91,58	93,00	101,55
		Indeks Kepuasan Jemaah Haji Luar Negeri	87,50	88,46	101,10
2	Terbangunnya ekosistem ekonomi haji yang berkelanjutan dan berdampak	Indeks Pemberdayaan Ekonomi Haji Berkelanjutan dan Berdampak	10	-	-
3	Terwujudnya tata kelola Badan Penyelenggara Haji yang profesional, transparan, adaptif, dan	Nilai Reformasi Birokrasi	58	-	-

	berintegritas				
--	---------------	--	--	--	--

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa indikator pada sasaran strategis pertama menunjukkan capaian yang sangat baik dengan realisasi yang melampaui target yang telah ditetapkan. Sementara itu, indikator pada sasaran strategis kedua dan ketiga masih dalam tahap penguatan kelembagaan dan pengembangan sistem pengukuran kinerja sehingga belum dapat diukur secara kuantitatif pada tahun pelaporan.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Sasaran Strategis 1

Terselenggaranya ibadah haji yang berkualitas, aman, nyaman, dan berorientasi pada mutu layanan serta peningkatan kualitas ibadah

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan pelayanan publik strategis yang menjadi tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional umat Islam untuk menunaikan ibadah haji secara aman, tertib, dan sesuai dengan tuntunan syariat. Oleh karena itu, kualitas pelayanan kepada jemaah menjadi salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji.

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator **Indeks Kepuasan Jemaah Haji (IKJH)** yang menggambarkan tingkat kepuasan jemaah terhadap berbagai aspek pelayanan haji, baik pada tahap pelayanan dalam negeri maupun pelayanan selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

Indeks Kepuasan Jemaah Haji Dalam Negeri

Indeks Kepuasan Jemaah Haji dalam negeri digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan yang diberikan sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan administrasi, pelaksanaan bimbingan manasik haji, pelayanan di asrama haji, serta proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci.

Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan mencapai nilai **91,58**. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi indikator ini mencapai nilai **93,00**, sehingga capaian kinerja mencapai **101,55 persen** dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kepada jemaah haji pada tahap pelayanan dalam negeri telah berjalan dengan sangat baik dan mampu memberikan tingkat kepuasan yang tinggi bagi jemaah.

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja tersebut antara lain:

1. peningkatan kualitas pelayanan administrasi pendaftaran dan pelunasan biaya haji;
2. penguatan pelaksanaan bimbingan manasik haji secara berjenjang dari tingkat kecamatan hingga kabupaten/kota;
3. peningkatan kualitas fasilitas pelayanan jemaah di asrama haji;
4. peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan ibadah haji;
5. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi dan manajemen jemaah haji.

Dengan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan kepada jemaah haji pada tahap pelayanan dalam negeri telah memenuhi harapan jemaah serta menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik di bidang penyelenggaraan ibadah haji.

Indeks Kepuasan Jemaah Haji Luar Negeri

Indeks Kepuasan Jemaah Haji luar negeri digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan yang diberikan selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan mencapai nilai **87,50**. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi indikator ini mencapai nilai **88,46**, sehingga capaian kinerja mencapai **101,10 persen** dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji Indonesia mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi jemaah selama berada di Arab Saudi.

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian indikator ini antara lain:

1. peningkatan kualitas layanan akomodasi jemaah di Makkah dan Madinah;
2. peningkatan kualitas layanan transportasi jemaah, baik transportasi antar kota maupun transportasi bus shalawat;
3. peningkatan kualitas layanan konsumsi bagi jemaah selama pelaksanaan ibadah haji;

4. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan jemaah haji;
5. peningkatan kapasitas dan profesionalisme petugas haji dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada jemaah.

Keberhasilan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang berorientasi pada peningkatan kepuasan jemaah.

3.2.2 Sasaran Strategis 2

Terbangunnya ekosistem ekonomi haji yang berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan umat

Pengembangan ekosistem ekonomi haji merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang timbul dari penyelenggaraan ibadah haji. Aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji mencakup berbagai sektor seperti transportasi, logistik, konsumsi, akomodasi, serta berbagai layanan pendukung lainnya.

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator **Indeks Pemberdayaan Ekonomi Haji Berkelanjutan dan Berdampak** dengan target nilai sebesar **10**.

Pada tahun 2025, indikator ini belum dapat diukur secara kuantitatif karena masih dalam tahap penyusunan metodologi pengukuran serta pengembangan sistem pengumpulan data.

Namun demikian, Kementerian Haji dan Umrah telah melaksanakan berbagai langkah persiapan strategis, antara lain:

- penyusunan kerangka pengembangan ekosistem ekonomi haji;
- pemetaan rantai nilai ekonomi haji;
- penguatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait;
- pengembangan kemitraan dengan pelaku usaha nasional.

3.2.3 Sasaran Strategis 3

Terwujudnya tata kelola Badan Penyelenggara Haji yang profesional, transparan, adaptif, dan berintegritas

Sasaran strategis ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola organisasi melalui implementasi reformasi birokrasi dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja.

Indikator yang digunakan adalah **Nilai Reformasi Birokrasi** dengan target sebesar **58**.

Pada tahun 2025, indikator ini belum dapat diukur secara resmi karena Kementerian Haji dan Umrah masih berada pada tahap penguatan kelembagaan sebagai kementerian yang baru dibentuk.

Namun demikian, berbagai langkah persiapan pelaksanaan reformasi birokrasi telah dilakukan, antara lain:

- penyusunan roadmap reformasi birokrasi;
- penataan struktur organisasi dan tata kerja kementerian;
- penguatan implementasi SAKIP;
- penguatan sistem pengawasan internal.

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis, Kementerian Haji dan Umrah terus berupaya mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien melalui penguatan koordinasi antarunit kerja, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan haji, serta penguatan sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Optimalisasi penggunaan sumber daya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji serta memperkuat tata kelola kelembagaan Kementerian Haji dan Umrah.

3,2 Realisasi Anggaran

Program	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Unit Pengampu	Anggaran		
					Pagu	Realisasi	% Kiner (H)=(G/F
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)=(G/F
DC. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama				Badan Penyelenggara Haji	103.356.608.000	92.312.937.114	89,31
DC. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	7155. Dukungan Administrasi dan Dokumen Haji Reguler	QAA. Pelayanan Publik kepada masyarakat	001. Layanan Administrasi Haji Dalam Negeri	Direktorat Dukungan Administrasi dan Dokumen Haji Reguler	6.122.440.000	5.297.134.528	86,52
	7156. Dukungan Akomodasi dan Transportasi Dalam Negeri	QAA. Pelayanan Publik kepada masyarakat	001. Layanan Administrasi Haji Dalam Negeri	Direktorat Dukungan Akomodasi, Konsumsi, Transportasi	2.349.806.000	1.697.285.200	72,23

Program	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Unit Pengampu	Anggaran		
					Pagu	Realisasi	%
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	Kiner (H)=(G/F)
			001. Petugas Haji yang Profesional		60.280.874.000	57.473.334.200	95,34
			002. Jemaah Haji Reguler yang Terbina		5.291.798.000	4.401.518.000	83,18
			001. Layanan Administrasi Haji Luar Negeri		14.164.297.000	13.000.388.903	91,78
			002. Jemaah Haji yang Terlayani Penyaluran Daging Qurban		1.824.987.000	1.610.865.821	88,27
	7159. Pengawasan Penyelenggaraan Haji	QDB. Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	001. Lembaga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang Terbina	Deputi Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji	13.322.406.000	8.832.410.462	66,30

Program	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Unit Pengampu	Anggaran		
					Pagu	Realisasi	%
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	Kiner (H)=(G/F)
WA. Program Dukungan Manajemen	7154. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji	EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal		Sekretaris	102.985.235.000	90.272.735.205	87,66
			956. Layanan BMN	Biro Keuangan dan Umum	1.035.808.000	689.340.000	66,55
			957. Layanan Hukum	Biro Hukum dan SDM	4.425.578.000	3.004.931.343	67,90
			958. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Biro Keuangan dan Umum	1.985.390.000	1.574.106.500	79,28
			959. Layanan Protokol	Biro Keuangan dan Umum	3.770.474.000	3.715.750.894	98,55
			960. Layanan Organisasi dan	Biro Hukum dan SDM	903.441.000	624.503.124	69,12

Program	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Unit Pengampu	Anggaran		
					Pagu	Realisasi	%
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	Kiner (H)=(G/F
			Tata Kelola Internal				
			962. Layanan Umum	Biro Umum	22.270.347.000	22.141.443.583	99,42
			994. Layanan Perkantoran	Biro Umum	56.990.130.000	50.179.419.223	88,05
		EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	954. Layanan Manajemen SDM	Biro Hukum dan SDM	2.003.178.000	1.407.723.189	70,27
		EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	952. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Biro Perencanaan dan Organisasi	8.894.805.000	6.502.825.899	73,11
			955. Layanan Manajemen Keuangan	Biro Keuangan dan Umum	706.084.000	432.691.450	61,28
					206.341.843.000	182.585.672.319	88,49

3.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran di Kementerian Haji dan Umrah bukan sekadar memotong biaya, melainkan strategi **optimalisasi nilai** (*value for money*). Mengingat skala operasional yang masif dan melibatkan lintas negara, efisiensi difokuskan pada penghematan biaya tanpa mengurangi standar layanan (*safetly and hospitality*) bagi jemaah.

Berikut adalah pilar utama strategi efisiensi anggaran yang biasanya diterapkan:

1. Digitalisasi Layanan (*E-Hajj & Smart Card*)

Transformasi digital adalah penggerak efisiensi terbesar. Dengan mengintegrasikan seluruh data jemaah dalam satu platform, kementerian dapat:

- **Memangkas Biaya Administrasi:** Pengurangan penggunaan kertas (*paperless*) dan proses birokrasi manual.
- **Transparansi Pembayaran:** Sistem pembayaran digital langsung ke vendor (katering, transportasi, hotel) di Arab Saudi mengurangi risiko kebocoran dana dan biaya perantara.
- **Monitoring Real-Time:** Penggunaan *Smart Card* bagi jemaah membantu kementerian melacak distribusi layanan secara akurat, mencegah pemborosan jatah konsumsi atau fasilitas yang tidak terpakai.

2. Strategi Kontrak Jangka Panjang (*Multi-year Contract*)

Untuk menekan fluktuasi harga pasar, kementerian sering melakukan negosiasi kontrak jangka panjang untuk:

Akomodasi (Hotel): Menyewa gedung di Mekkah dan Madinah dengan skema *full season* atau kontrak 3-5 tahun untuk mendapatkan harga yang jauh lebih murah dibanding harga pasar tahunan.

Transportasi Udara: Negosiasi harga avtur dan sewa pesawat jauh-jauh hari melalui skema tender terbuka yang kompetitif.

3. Skema Pendanaan Berkelanjutan

Efisiensi juga dilihat dari cara mengelola dana titipan jemaah:

1. **Optimalisasi Nilai Manfaat:** Mengelola setoran awal jemaah melalui instrumen investasi syariah yang aman (seperti sukuk atau emas) untuk mensubsidi biaya riil haji yang terus meningkat.
2. **Self-Funding Model:** Mendorong kemandirian finansial pada sektor-sektor tertentu agar tidak sepenuhnya bergantung pada APBN, melainkan dari hasil pengembangan dana abadi umat (ekosistem ekonomi haji).

4. Evaluasi Berbasis *Standard Costing*

Kementerian menerapkan standar biaya masukan (SBM) yang ketat untuk komponen di luar negeri:

1. **Audit Katering:** Menetapkan standar harga per porsi yang seragam dengan kualitas gizi yang tetap terjaga melalui sistem zonasi.
2. **Efisiensi Organisasi:** Rasio petugas haji dibanding jumlah jemaah dioptimalkan. Penggunaan tenaga musiman (temus) dari mahasiswa atau mukimin lokal di Arab Saudi sering kali lebih efisien daripada menerbangkan seluruh petugas dari tanah air.

Tabel Gambar

Komponen Biaya	Metode Efisiensi	Dampak Finansial
Penerbangan	Tender kompetitif & <i>Direct flight</i>	Penurunan biaya avtur & <i>handling</i>
Konsumsi	Kontrak dengan dapur lokal skala besar	Harga satuan lebih rendah (<i>bulk buying</i>)
Akomodasi	Sistem sewa blok/gedung penuh	Stabilitas harga di tengah inflasi Saudi

Komponen Biaya	Metode Efisiensi	Dampak Finansial
Manajemen	Aplikasi <i>E-Hajj</i> Terintegrasi	Pengurangan biaya SDM administratif

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja Kementerian Haji dan Umrah) Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah serta pengembangan ekosistem ekonomi haji. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Tahun 2025 merupakan periode awal penguatan kelembagaan Kementerian Haji dan Umrah sebagai bagian dari transformasi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Transformasi kelembagaan dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kementerian Agama menjadi Badan Penyelenggara Haji, dan selanjutnya menjadi Kementerian Haji dan Umrah, merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fokus, profesionalisme, serta akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Dalam pelaksanaan tugasnya pada tahun 2025, Kementerian Haji dan Umrah menetapkan tiga sasaran strategis utama yang menjadi fokus kinerja organisasi, yaitu terselenggaranya ibadah haji yang berkualitas, aman, nyaman, dan berorientasi pada mutu layanan serta peningkatan kualitas ibadah; terbangunnya ekosistem ekonomi haji yang berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan umat; serta terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, adaptif, dan berintegritas.

Capaian kinerja pada sasaran strategis pertama menunjukkan hasil yang sangat baik. Indeks Kepuasan Jemaah Haji Dalam Negeri pada tahun 2025 mencapai nilai

93,00, melampaui target yang ditetapkan sebesar **91,58**, dengan tingkat capaian sebesar **101,55 persen**. Sementara itu, Indeks Kepuasan Jemaah Haji Luar Negeri mencapai nilai **88,46**, melampaui target sebesar **87,50**, dengan tingkat capaian sebesar **101,10 persen**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji Indonesia mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi jemaah, baik pada tahap pelayanan dalam negeri maupun selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

Sementara itu, indikator kinerja pada sasaran strategis kedua yaitu Indeks Pemberdayaan Ekonomi Haji Berkelanjutan dan Berdampak dengan target sebesar **10** masih dalam tahap pengembangan metodologi pengukuran dan penyusunan sistem pengumpulan data. Demikian pula pada sasaran strategis ketiga, indikator Nilai Reformasi Birokrasi dengan target **58** belum dapat diukur secara resmi karena Kementerian Haji dan Umrah masih dalam tahap penguatan kelembagaan sebagai kementerian yang baru dibentuk. Meskipun demikian, berbagai langkah persiapan strategis telah dilaksanakan untuk mendukung implementasi kebijakan pengembangan ekosistem ekonomi haji serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kementerian.

Ke depan, Kementerian Haji dan Umrah akan terus memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah, mempercepat implementasi reformasi birokrasi, serta mengembangkan ekosistem ekonomi haji yang berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan jemaah, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan umat dan pembangunan nasional.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Haji dan Umrah Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi instrumen evaluasi kinerja organisasi sekaligus menjadi dasar dalam melakukan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia.